



LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah dan karuniaNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lapas Kelas IIA Pangkalpinang Tahun 2022 dapat diselesaikan. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Lapas Kelas IIA Pangkalpinang yang dalam proses penyusunannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LkjIP Lapas Kelas IIA Pangkalpinang Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui penyusunan LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip - prinsip *good and clean governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pangkalpinang, Januari 2023

Kepala,

Badarudin, A.Md. IP, S.H., M.H

NIP 197508251999021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Aspek Strategis	6
E. Isu Strategis	6
F. Sistematika Laporan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran	16
C. Capaian Kinerja Anggaran	18
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	18
BAB IV PENUTUP	20
A. Kesimpulan	20
B. Saran	20
LAMPIRAN	21

IKHTISAR EKSEKUTIF

“Laporan Kinerja Lapas Kelas IIA Pangkalpinang Tahun 2022 sebagai bentuk laporan pelayanan dan pertanggung jawaban kepada publik”



Laporan Kinerja Lapas Kelas IIA Pangkalpinang Tahun 2022 sebagai bentuk laporan pelayanan dan pertanggung jawaban kepada publik atas pelaksanaan mandat konsitusi dan Visi - Misi Presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang terdiri dari :

8 (DELAPAN) SASARAN STRATEGIS

- 1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan;**
- 2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;**
- 3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;**
- 4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;**
- 5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;**
- 6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;**
- 7. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM; dan**
- 8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh institusi pemerintah. Oleh karena itu diperlukan sebuah laporan dan indikator yang sudah ditetapkan dalam persyaratan penilaian. Guna memotivasi untuk meningkatkan kinerja suatu instansi demi terwujudnya aspirasi masyarakat dan tercapainya tujuan tujuan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem kinerja dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktek – praktek tercela seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik untuk itu perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik di Indonesia. Lapas Kelas IIA Pangkalpinang merupakan Unit Pelayanan Teknis dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta pemajuan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020- 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024,

Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045.

Dalam rangka mendukung pencapaian program pemerintah tersebut Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah menjalankan prinsip dan pedoman kerja secara terukur dan terarah dimana tingkat kepuasan layanan terhadap masyarakat dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan secara konsisten.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-05.0T.01.01 Tahun Tanggal 24 November 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana / Anak Didik. Kedudukannya berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, serta bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia RI.

Tugas Pokok

Melaksanakan Pemasyarakatan bagi Narapidana / Anak Didik sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

Fungsi

1. Melaksanakan pembinaan narapidana /anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan sehari – hari mengacu pada struktur organisasi Lapas Kelas II Pangkalpinang terbagi menjadi beberapa Fungsi / Bagian yaitu :

1. Bagian Tata Usaha;

Tugas

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS

Fungsi

- a. Melakukan urusan kepegawaian;
- b. Melakukan urusan keuangan;
- c. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

- Urusan Kepegawaian dan Keuangan;

Tugas

Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian;

- Urusan Umum;

Tugas

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

2. Bidang Pembinaan;

Tugas

Bidang Pembinaan mempunyai tugas memberikan pembinaan pemasyarakatan bagi Narapidana / Anak Didik

Fungsi

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik;
- b. Memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana / anak didik;
- c. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik;

Bidang Pembinaan Terdiri dari :

- Seksi Registrasi;

Tugas

Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan, pelaporan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik;

- Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan ;

Tugas

Seksi Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan narapidana / anak didik; mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik;

3. Bidang Kegiatan Kerja;

Tugas

Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja

Fungsi

- a. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana / anak didik dan mengelola hasil kerja;
- b. Mengelola hasil kerja;

- c. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;

Bidang Kegiatan Kerja Terdiri dari :

- Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja;

Tugas

Seksi Bimbingan Kerja mempunyai tugas Memberikan Petunjuk dan Bimbingan Latihan Kerja bagi narapidana / anak didik; Mengolah hasil kerja;

- Seksi Sarana Kerja;

Tugas

Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;

4. **Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;**

Tugas

Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib

Fungsi

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib;

Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Terdiri dari :

- Seksi Keamanan;

Tugas

Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;

- Seksi Pelaporan dan Tata Tertib;

Tugas

Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib;

5. **Kesatuan Pengamanan LAPAS.**

Tugas

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS

Fungsi

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik;

- Melakukan pemeliharaan dan tata tertib;
- Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik;
- Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan;

Peran dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengamanan LAPAS yaitu:

- Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan Membawahi Petugas Pengamanan LAPAS;
- Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Lapas Klas IIA Pangkalpinang

C. Maksud dan Tujuan

Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Kelas IIA Pangkalpinang Tahun 2022 serta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

Tujuan

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja Lapas Kelas IIA Pangkalpinang yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

D. Aspek Strategis

Apabila melihat Struktur Organisasi dan fungsi yang diemban oleh Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, maka diperlukan peran serta seluruh pegawai dan pihak terkait dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kompeten, berkinerja, dan profesional serta memberikan layanan bagi Warga Binaan yang melalui penyediaan pelayanan di bidang pembinaan dan kepribibadian yang berkualitas.

Aspek strategis Lapas Kelas IIA Pangkalpinang yang menjadi perhatian bagi peningkatan kualitas layanan sebagai bagian dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dijabarkan sebagai berikut :

1. Dengan adanya Pandemi Covid-19, mendorong Lapas Kelas IIA Pangkalpinang untuk meningkatkan kualitas layanan melalui digitalisasi.
2. Melakukan analisis permasalahan kinerja bagi pegawai yang tidak mampu mencapai dan mendukung target kerja dan rencana strategi serta mencari pemecahan dalam mengatasinya.
3. Peningkatan kepatuhan dalam kehadiran dengan memberikan *punishment* berupa pemotongan gaji / tunjangan bagi pekerja yang melanggar.
4. Dalam upaya peningkatana kualitas hidup bagi Warga Binaan perlu ditingkatkan lagi pelatihan kompetensi dalam bidang pembinaan kemandirian.

E. Isu Strategis

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan. Pedoman penyusunan pelaporan kinerja diatur dalam Keputusan Meteri Hukum dan HAM M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaan kinerja Pemerintah selalu mengalami perubahan untuk mewujudkan tuntutan masyarakat yang selalu mencermati dan memperhatikan kinerja Pemerintah dalam pelayanan. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimulai dari strukturalisasi kelembagaan, reformasi birokrasi yang dibuat dalam tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi, sehingga terwujud

tujuan Pemerintah daerah dalam mencapai *Good dan Clean Governance*. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas sehari - hari adalah :

1. Kepatuhan penggunaan anggaran.
2. Masih ada beberapa fungsi / bagian yang mengirim laporan bulanan yang belum valid dan tidak sesuai standar.
3. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan serta inventarisasi barang milik negara belum optimal.
4. Sistem pengawasan pengamanan dan pengendalian internal masih perlu ditingkatkan.
5. Perlu adanya peningkatan kompetensi bagi pegawai dalam menjalankan tugas sehari – hari

Upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Melakukan pengawasan penyusunan anggaran sesuai perencanaan, tepat waktu, efisien dan efektif
2. Melakukan sosialisasi, sinkronisasi kepada fungsi / bagian yang bersangkutan dalam pembuatan laporan yang sesuai standar
3. Menyusun rencana kerja dan inventarisir seluruh barang milik negara secara optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang – undangan.
4. Melakukan rotasi dan mutasi guna memberikan penyegaran terhadap tugas dan fungsi petugas.
5. Membuat rencana pengembangan karir dan meningkatkan kompetensi dengan mengikutkan pelatihan sesuai dengan tugas masing – masing.

F. Sistematika Laporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Lapas Kelas IIA Pangkalpinang tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN menjelaskan tentang Latar Belakang, Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi, Maksud Dan Tujuan, Aspek Strategis, Isu Strategis, Sistematika Laporan.

BAB II PERENCANAAN Kinerja menjelaskan tentang Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, Capaian Kinerja Anggaran, Capaian Kinerja Lainnya.

BAB IV PENUTUP menjelaskan Kesimpulan, Saran untuk peningkatan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, terukur dan akuntabel, maka telah disusun sasaran strategis Lapas Kelas IIA Pangkalpinang yang memiliki indikator kinerja utama dengan target yang harus dicapai mengacu dengan kinerja induk pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020-2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, terdapat 8 (delapan) Sasaran Strategis dengan 21 Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM yakni:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di Bidang Hukum dan HAM; dan
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

VISI

"Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum"

MISI

1. Mewujudkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja pada tahun 2022, Lapas Kelas IIA Pangkalpinang memperoleh anggaran sebesar Rp. 10.851.207.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh ribu rupiah) dengan pengalokasian pada setiap sasaran strategis sebagai berikut :

Level Persepektif Organisasi	Kode SS	Narasi Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
Perspektif Pemangku Kepentingan Eksternal	Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terpenuhinya peraturan perundang- undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang- undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
	Sasaran Strategis 2 (SS2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah propinsi/kabupaten/ kota memenuhi target
	Sasaran Strategis 3 (SS3)	Memastikan pelayanan public di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
	Sasaran Strategis 4 (SS4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovadi dan kreatifitas dalam nasional	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase klien pasyarakat yang produktif, mandiri dan berdaya guna 5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terhaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) 6. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan
	Sasaran Strategis 5 (SS5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan

			2. Persentase penegakan hukum keimigrasi yang maksimal
	Sasaran Strategis 6 (SS6)	Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa / kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
Perspektif Pembelajaran Dan Pertumbuhan	Sasaran Strategis 7 (SS7)	Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkatnya kinerjanya
	Sasaran Strategis 8 (SS8)	budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atass Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

Gambar 2.1
Rencana Strategis

Pencapaian seluruh rencana strategis dan rencana kinerja Lapas Kelas IIA Pangkalpinang tidak terlepas dari dukungan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana yang handal serta dukungan Sumber Daya Manusia (*Man Power*). Per 31 Desember 2022 berikut data pegawai

Lapas Kelas IIA Pangkalpinang :

Pegawai Laki : 71 Orang

Pegawai Perempuan : 8 Orang

Pegawai dengan Pendidikan SMA : 38 Orang

Pegawai dengan Pendidikan D3 : 2 Orang

Pegawai dengan Pendidikan S1 : 37 Orang

Pegawai dengan Pendidikan S2 : 2 Orang

B. Perjanjian Kinerja

Pencapaian kinerja Lapas Kelas IIA Pangkalpinang Tahun 2022 untuk setiap perjanjian kinerja dan sasaran strategis sudah disusun sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis capaian kinerja telah dilaksanakan aksi / tindakan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang akan dilakukan.

Program dan kegiatan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja setiap unit kerja (UPT), yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Lapas Kelas IIA Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85%
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85%
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85%
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83%
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56%
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5%
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	3 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	29 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	28 Unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	15 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 4.318.575.000
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 4.318.575.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.834.787.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 5.834.787.000

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatan


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap capaian kinerja Lapas Kelas IIA Pangkalpinang diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi pada Tahun 2022.
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
3. Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap persyaratan kinerja dari sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan bersama antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dengan Kepala Lapas Kelas IIA Pangkalpinang kemudian dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Lapas Kelas IIA Pangkalpinang beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

 CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022						
No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)	Capaian (5)		
1.	Meningkatnya pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan /Anak, Pengendalian Penyakit/ Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	100%		
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	98%		
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	tidak ada WBP Perempuan		
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	100%		
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%		
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%		
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	80%		
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%	tidak ada kegiatan rehabilitasi pecandu narkoba		
		2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	84%
				Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	92%
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%			97%		
Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%			93%		
Persentase Narapidana resiko tinggi Yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%			tidak tercapai karena berdasarkan hasil litmas dan assesment resiko tidak ada WBP masuk dalam kategori high risk		
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%			26,5%		
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase narapidana yang berkegiatan produktif	67%	60%		
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	65%		
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	90%		
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	80%		
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satket	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	70%		
		Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan		
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan		
		Terperuhnya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan	1 Layanan		
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan		
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan		

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan table diatas, dapat disimpulkan hampir secara keseluruhan seluruh sasaran strategis kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan oleh Lapas Kelas IIA Tahun 2022 tercapai dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

B. Realisasi Anggaran

Dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah mencapai nilai melebihi target yang di tentukan. Evaluasi telah dilakukan setelah penetapan indikator dan penetapan capaian kinerja. Sesuai dengan substansinya maka akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan cerminan dari kebijakan, program, manajemen, proses dan ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dapat diawali dengan penilaian terhadap kinerja kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Pengukuran Kinerja sesuai Rencana Kerja Tahunan dan Indikator Kinerja. Berdasarkan hasil dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dalam suatu program, dapat dilakukan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan analisis akuntabilitas kinerja seperti tersebut pada Tabel 3.1 diatas, maka untuk target dan realisasi dari anggaran dapat tercapai seperti tersebut pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

TARGET DAN REALISASI ANGGARAN LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG TAHUN 2022

NO	JENIS BELANJA	PAGU		REALISASI			
		2021	2022	2021	%	2022	%
1	Pegawai	4.896.649.000	5.032.951.000	4.895.422.114	99,97	5.031.195.280	99,97
2	Barang	5.055.770.000	5.750.736.000	4.976.289.200	98,43	5.747.617.387	99,95
3	Modal	-	67.520.000	-	-	67.513.750	99,99
TOTAL		9.952.419.000	10.851.207.000	9.871.711.314	99,19	10.846.326.417	99,96

Tabel 3.2
Data Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Analisis Akuntabilitas kinerja Lapas Kelas IIA Pangkalpinang tidak terlepas dari implementasi tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset yang meliputi pengelolaan keuangan dan aset mulai dari perencanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pengelolaan anggaran sesuai dengan prinsip dan kaidah yang telah ditetapkan. Pencapaian Kinerja Lapas Kelas IIA Pangkalpiang tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat internal yakni mendukung tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme

di bidang pengelolaan keuangan dan aset dengan melakukan peningkatan pelayanan public, administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian serta perencanaan.

2. Capaian Kinerja program dan kegiatan yang bersifat eksternal yaitu menjadi organisasi yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada hasil untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Skala pengukuran rata-rata capaian indikator output adalah 90% dari target 100% masuk katagori “sangat berhasil”.
3. Dengan hasil capaian kinerja tersebut output dari pekerjaan/kegiatan pelaksanaan sudah sesuai tatakala, baik secara fisik maupun keuangan.

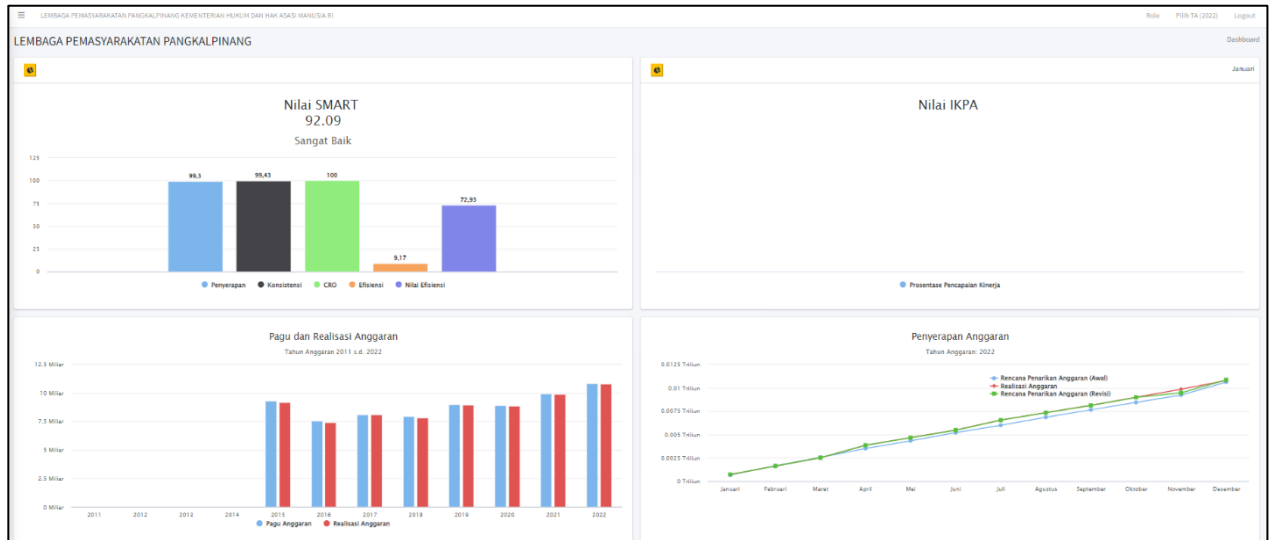
Kinerja Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah memenuhi target melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk mempertahankan/ meningkatkan kinerja keuangan dan layanan dengan cara meminimalkan permasalahan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan, sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknik, monitoring, pendampingan kepada pegawai dan warga binaan secara intensif dan berkelanjutan. Akuntabilitas Keuangan Pertanggungjawaban baik yang berasal dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencapaian realisasi cukup tinggi dikarenakan Belanja Tidak langsung meliputi Belanja Gaji PNSD yang merupakan belanja wajib dan mengikat.

Pencapaian realisasi cukup tinggi disertai dengan pencapaian output dan target output kegiatan sesuai yang ditargetkan. Adapun dari anggaran Belanja Langsung dan setoran PNBPN dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pencapaian realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 10.846.326.417 (99,96%)
2. Realisasi setoran PNBPN tahun 2022 sebesar Rp. 22.452.122 (100%)

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa Lapas Kelas IIA Pangkalpinang telah berhasil melaksanakan tugas pencapaian sasaran kegiatan yang diamanatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung.

C. Capaian Kinerja Anggaran



Tabel 3.3
Data Aplikasi SMART DJA Tahun 2022

Berdasarkan data Aplikasi SMART DJA sesuai tabel diatas menunjukkan angka 92,09 dengan predikat sangat baik, hal ini dapat tercapai dengan baik karena kepatuhan dalam penggunaan anggaran yang telah dijalankan oleh Lapas Kelas IIA Pangkalpinang

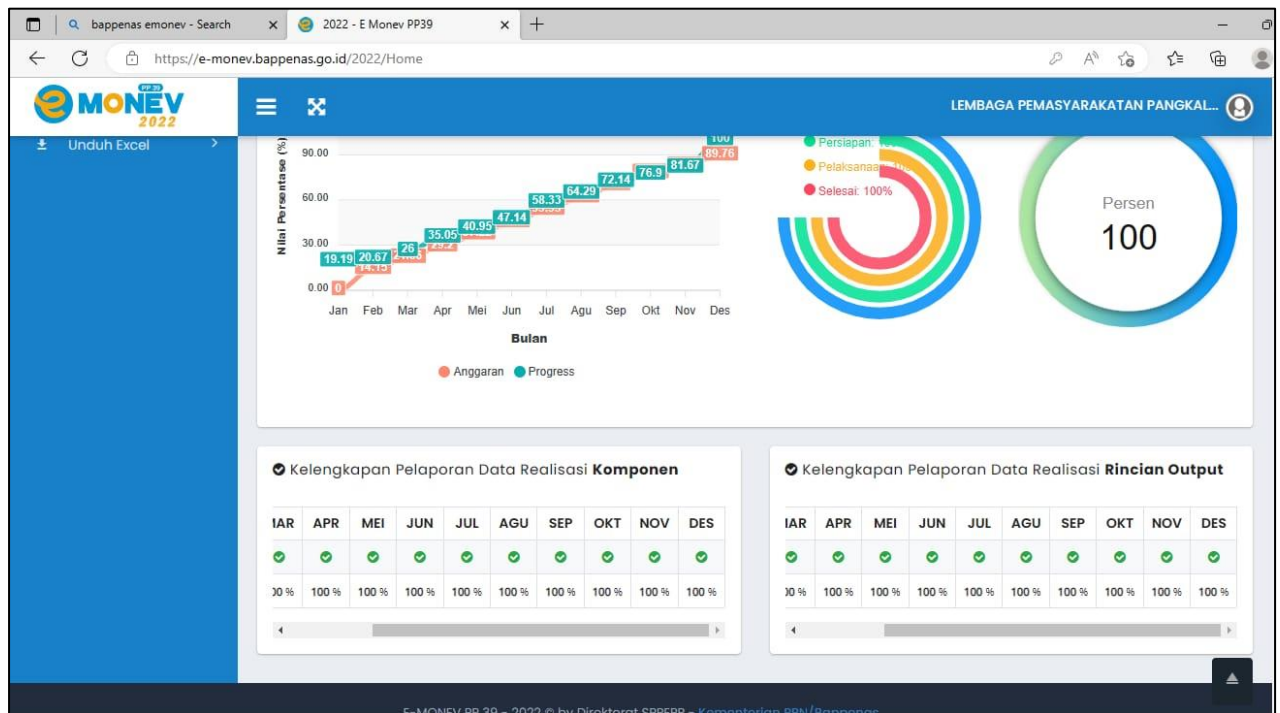
D. Capaian Kinerja Lainnya ePerformance

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN : 2022 LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANGKALPINANG																																
NO	SASARAN	STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCADING	MASUK	TARGET	REALISASI	LAMPIRAN	CATATAN MONITORING	BOBOT	BSC SCORE(%)																				
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkoba di wilayah		1	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	KELUAR		75 Persentase; Triwulan IV	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WAKTU PENYELESAIAN</th> <th>JUMLAH</th> <th>SATUAN</th> <th>JUMLAH (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TW1</td> <td>15</td> <td>persentase</td> <td>15 100</td> </tr> <tr> <td>TW2</td> <td>17</td> <td>persentase</td> <td>17 100</td> </tr> <tr> <td>TW3</td> <td>20</td> <td>persentase</td> <td>20 100</td> </tr> <tr> <td>TW4</td> <td>23</td> <td>persentase</td> <td>23 100</td> </tr> </tbody> </table>	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)	TW1	15	persentase	15 100	TW2	17	persentase	17 100	TW3	20	persentase	20 100	TW4	23	persentase	23 100			0	0
WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)																													
TW1	15	persentase	15 100																													
TW2	17	persentase	17 100																													
TW3	20	persentase	20 100																													
TW4	23	persentase	23 100																													
			1	2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas			93 Persentase; Triwulan IV	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WAKTU PENYELESAIAN</th> <th>JUMLAH</th> <th>SATUAN</th> <th>JUMLAH (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TW1</td> <td>20</td> <td>persentase</td> <td>20 100</td> </tr> <tr> <td>TW2</td> <td>23</td> <td>persentase</td> <td>23 100</td> </tr> <tr> <td>TW3</td> <td>23</td> <td>persentase</td> <td>23 100</td> </tr> <tr> <td>TW4</td> <td>27</td> <td>persentase</td> <td>27 100</td> </tr> </tbody> </table>	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)	TW1	20	persentase	20 100	TW2	23	persentase	23 100	TW3	23	persentase	23 100	TW4	27	persentase	27 100			0	0
WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)																													
TW1	20	persentase	20 100																													
TW2	23	persentase	23 100																													
TW3	23	persentase	23 100																													
TW4	27	persentase	27 100																													

Tabel 3.4
Data Aplikasi ePerformance Tahun 2022

Berdasarkan data Aplikasi ePerformance sesuai tabel diatas menampilkan data dengan warna hijau mengindikasikan bahwa seluruh target kinerja sudah tercapai dengan baik, hal ini dapat tercapai dengan baik karena pelaksanaan kinerja dijalankan sesuai dengan rencana kinerja yang telah disusun oleh Lapas Kelas IIA Pangkalpinang

eMonev BAPPENAS



Tabel 3.5
Data Aplikasi eMonev BAPPENAS Tahun 2022

Berdasarkan data Aplikasi eMonev BAPPENAS sesuai tabel diatas menampilkan data grafik progress penggunaan anggaran mencapai nilai 100%, dimana antara anggaran yang telah dialokasikan perbulan dengan progress penyerrapan tercapai dengan baik, hal ini dapat terlaksana karena kepatuhan penggunaan anggaran yang telah disusun oleh Lapas Kelas IIA Pangkalpinang

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan merupakan sebuah pendekatan manajemen berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik untuk itu perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun. Oleh karena itu Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dalam menyusun Laporan Kinerja berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022, strategis dan kinerja lainnya, serta realisasi keuangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Lapas Kelas IIA Pangkalpinang sudah berhasil melakukan optimalisasi dalam penggunaan anggaran tahun 2022 dengan nilai realisasi 99,97 %
2. Berhasil melakukan efisiensi dan mendorong efektivitas belanja yang dibuktikan dengan
3. Capaian kinerja pengelolaan pegawai telah dilakukan dengan baik dan terencana.
4. Realisasi anggaran capaian indikator keuangan adalah 93,09% dari target 100% masuk katagori “sangat berhasil”.

B. Saran

Berdasarkan capaian kinerja Lapas Kelas IIA Tahun 2022, Kepala Lapas Kelas IIA beserta seluruh jajaran staf telah Menyusun rencana startegis yang dirancang untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023. Dalam rangka mencapai rencana strategis tersebut maka Kepala Lapas Kelas IIA Pangkakpinang menyampaiakn beberapa sebagai berikut :

1. Dengan adanya kebijakan pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi maka diperlukan suatu penyempurnaan metode pengembangan karier PNS;
2. Pengembangan dan integrasi aplikasi dalam seluruh layanan kepegawaian dalam merespon dinamika dan perubahan organisasi .
3. Percepatan pelaksanaan pemetaan kompetensi secara masif dan berkelanjutan dilaksanakan bagi seluruh pegawai untuk menyediakan peta profil kuadran kompetensi PNS.
4. Perlunya peningkatana kehandalan sarana dan prasarana yang ada guna mengoptimalkan kinerja tahun mendatang.

LAMPIRAN

- Rekapitulasi Perjanjian Kerjasama
- ePerformance Tahun 2022



**DAFTAR PERJANJIAN KERJASAMA
LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG DENGAN INSTANSI TERKAIT**

No	Judul Kerjasama	Nomor Perjanjian Kerjasama	Masa Berlaku
1	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Dan Kemeterian Agama Provinsi Bangka Belitung Tentang Layanan Pembinaan Kepribadian Bidang Kerohanian Agama Budha	<ul style="list-style-type: none"> • W.7-PAS.PAS1.PK.05.01-541 • B.2063/Kw.29.Pm.4/BA.00/5/2022 	31 Mei 2022 S.D 31 Mei 2025
2	Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Dan Rumah Sakit Umumdaerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang Tentang Pelayanan Kesehatan Pasien Rujukan Bagi Warga Binaan Pemsyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • W.7-PAS.PAS1.PK.01.06.08-048 • 440/012/RSUDDH/I/2022 	18 Januari 2022 S.D 18 Januari 2025
3	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Dan Kemeterian Agama Provinsi Bangka Belitung Tentang Layanan Pembinaan Kepribadian Bidang Kerohanian Agama Hindu	<ul style="list-style-type: none"> • W.7.PAS.PAS.1.PK.05.01-536 	31 Mei 2022 S.D 31 Mei 2025
4	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Dan Kemeterian Agama Provinsi Bangka Belitung Tentang Layanan Pembinaan Kepribadian Bidang Kerohanian Agama Kristen	<ul style="list-style-type: none"> • W.7-PAS.PAS.1.PK.05.01-538 • B-2035/Kw.29.Pm.2/Ba.00/05/2022 	31 Mei 2022 S.D 31 Mei 2025

5	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Dan Kemeterian Agama Provinsi Bangka Belitung Tentang Layanan Pembinaan Kepribadian Bidang Kerohanian Agama Kristen Khatolik	<ul style="list-style-type: none"> • W.7.PAS.PAS.1.PK.05.01-535 • B-2034/Kw29.Pm.1/BA.00/05/2022 	31 Mei 2022 S.D 31 Mei 2025
6	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Dan Kemeterian Agama Provinsi Bangka Belitung Tentang Layanan Pembinaan Kepribadian Bidang Kerohanian Agama khonguchu	<ul style="list-style-type: none"> • W.7.PAS.PAS.1.PK.05.01-537 • B-2017/Kw29.Pm.05/BA.01.1/05/2022 	31 Mei 2022 S.D 31 Mei 2025
7	Perjanjian Kerjasama Antara Lembaga Pemsrakatan Kelas IIA Pangkalpinang Dan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tentang Pelaksanaan Program Pengendalian HIV AIDS Dan Kolaborasi TB-HIV Bagi Wargabinaan Pemasarykatan Dan Tahanan	<ul style="list-style-type: none"> • W.7-PAS.PAS.1-930.PK.06.07 • 020/PKS/DINKES/VIII/2022 	29 Agustus 2022 S.D 29 Agustus 2024
8	Perjanjian Kerjasama Antara Lemabaga Pemasarykatan Kelas IIA Pangkalpinang Dan UPTD.Puskesmas Gerunggung Kota Pangkalpinang Tentang Peningkatan Derajat Kesehatan Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasarykatan Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang	<ul style="list-style-type: none"> • W7.PAS.1-UM.06.06-86 • 440/008/UPTD.PUSK.GRG/I/2022 	25 Januari 2022 S.D 25 Januari 2023
9	Perjanjian Kerja Sama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung	<ul style="list-style-type: none"> • W.7-PAS.PAS.1-KU.02.01-508 • 10/SPP/PKS/2022 	25 Mei 2022 S.D 25 Mei 2024

	Cabang Syariah Pangkalpinang Dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Pangkalpinang Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Pelayanan Jasa Perbankan		
10	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Dan Kementerian Agama kota pangkalpinang Tentang Layanan Pembinaan Kepribadian Bidang Kerohanian dan mental spritual terhadap WBP	<ul style="list-style-type: none"> • W.7-PAS.PAS.1-PK.05.01-532 • 162.Kb.29.03.TU/HM.01.5/05/2022 	31 Mei 2022 S.D 31 Mei 2025
11	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Dan Gereja Katolik Paroki St .Yosef Pangkalpinang Tentang Layanan Pembinaan Kepribadian Bidang Kerohanian Dan Mental Spritual Dan Asimilasi Kerja Sosial Terhadap WBP	<ul style="list-style-type: none"> • W.7-PAS.PAS.1-PK.05.01-534 • 	31 Mei 2022 S.D 31 Mei 2025
12	Perjanjian Kerja Sama Antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Dan Koperasi Produsen Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Tentang Program Pembinaan Kemandirian Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Pengelolaan Toko Dan Kantin Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang	<ul style="list-style-type: none"> • W.7-PAS.PAS.1-KU.02.01-510 • 04/KP LPTT/V/2022 	24 MEI 2022 S.D 24 MEI 2024

13	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Dan PT Langgeng Duta Bersama Tentang Pengembangan Binih Kelapa Sawit Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pelaksanaan Layanan Pembinaan Kemandirian ,Sarana Asimilasi Edukasi (SAE) Dan Sarana Asimilasi Kerja Sosial Dalam Rangka Pengembangan Intelektual Kemandirian Pada Bidang Pertanian Tepat Guna Spesifik Lokasi Bagi WBP	<ul style="list-style-type: none"> • W.7-PAS.PAS.1-PK.01.08.03-350 • 	31 Januari 2022 s.d 31 Januari 2024
14	Perjanjian Kerjasama Antara Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Dan KODIM 0413/BANGKA Tentang Keamanan Dan Ketertiban Di Lingkungan Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang	<ul style="list-style-type: none"> • W.7-PAS.PAS.1-HH.05.05-206 • B/93/II/2021 	15 Februari 2021 s.d 15 Februari 2023
15	Perjanjian Kerjasama Antara Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Dengan Badan Narkotika Nasional Kota Pangkalpinang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika	<ul style="list-style-type: none"> • W.7-PAS.PAS.1-HH.05.05-207 • PKS/3/1/Ka/cm/2021/BNNK.PKP 	10 Maret 2021 S.d 10 Maret 2023
16	Perjanjian Kerjasama Antara Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Dan Kepolisian Resort Pangkalpinang Tentang Keamanan Dan Ketertiban Di Lingkungan Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> • W.7-PAS.PAS.1-HH.05.05-205 tahun 2021 • MOU/21/II/2021 Tanggal 22 februari 2021 	15 Februari 2021 S.D 15 Februari 2023

	Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang		
17	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Dan persekutuan EVANGELISM EXPLOSION "EE" Bangka Tentang Layanan Pembinaan Kepribadian Bidang Kerohanian Dan Mental Spritual Dan Asimilasi Kerja Sosial Terhadap WBP	<ul style="list-style-type: none"> • W.7-PAS.PAS.1-PK.05.01-533 	31 Mei 2022 S.D 31 Mei 2025
18	Perjanjian Kerjasama Antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Dan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pangkalpinang Tentang Pengelolaan Zakat, Infak Shodaqoh Dan Sosial Keagamaan Lainnya Di Lingkungan Lapas Pangkalpinang	<ul style="list-style-type: none"> • W.7-PAS.PAS.1-UM.06.01-382 • 001/SEKR-MoU/BAZNAS-PKP/IV/2022 	14 April 2022 S.D 14 April 2025



E-PERFORMANCE

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA

TAHUN

UNIT KERJA

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN : 2022 LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANGKALPINANG

NO	SASARAN	STRATEGIS	NO	INDIKATOR	KINERJA	CASCADING		TARGET					REALISASI		CATATAN MONITORING	BSC		
						KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRAN		BOBOT	SCORE(%)	
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah		1	1	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar			75 Persentase; Triwulan IV	TW1	15	persentase	15	100	Januari : Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar Februari: Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar Maret:			0	0
									TW2	17	persentase	17	100	April : Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar Mei: Juni:				
									TW3	20	persentase	20	100	Juli : Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar Agustus: September:				
									TW4	23	persentase	23	100	Oktober : November: Desember:				
			1	2	2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas			93 Persentase; Triwulan IV	TW1	20	persentase	20	100	Januari : Februari: Maret:			0	0
									TW2	23	persentase	23	100	April : Mei: Juni:				
									TW3	23	persentase	23	100	Juli : Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas Agustus: September:				
									TW4	27	persentase	27	100	Oktober : November: Desember:				
			1	3	3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal			96 persentase; Triwulan IV	TW1	15	persentase	0		Januari : Februari: Maret:			0	0
									TW2	17	persentase	0		April : Mei: Juni:				
									TW3	20	persentase	0		Juli : Agustus: September:				
									TW4	34	persentase	0		Oktober : November: Desember:				

NO	SASARAN	STRATEGIS	NO	INDIKATOR	KINERJA	CASCADING		TARGET				REALISASI		CATATAN MONITORING	BSC		
						KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN		LAMPIRAN	BOBOT	SCORE(%)
			1	4	4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani			70 persentase; Triwulan IV	TW1	15	persentase	15	100	Januari : Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani Februari: Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani Maret: Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani pada tri semester		0	0
					Sasaran Kinerja Pegawai :				TW2	15	persentase	15	100	April : Mei: Juni:			
									TW3	20	persentase	20	100	Juli : Agustus: September:			
									TW4	20	persentase	20	100	Oktober : November: Desember:			
			1	5	5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			80 persentase; Triwulan IV	TW1	17	persentase	17	100	Januari : Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Februari: Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Maret:		0	0
					Sasaran Kinerja Pegawai :				TW2	17	persentase	17	100	April : Mei: Juni:			
									TW3	18	persentase	18	100	Juli : Agustus: September:			
									TW4	28	persentase	28	100	Oktober : November: Desember:			
			1	6	6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			80 persentase; Triwulan IV	TW1	17	persentase	17	100	Januari : Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Februari: Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Maret:		0	0
					Sasaran Kinerja Pegawai :				TW2	17	persentase	17	100	April : Mei: Juni:			
									TW3	18	persentase	18	100	Juli : Agustus: September:			
									TW4	28	persentase	28	100	Oktober : November: Desember:			
			1	7	7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)			70 persentase; Triwulan IV	TW1	15	persentase	15	100	Januari : Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) Februari: Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) Maret:		0	0
					Sasaran Kinerja Pegawai :				TW2	15	persentase	15	100	April : Mei: Juni:			
									TW3	15	persentase	15	100	Juli : Agustus: September:			
									TW4	25	persentase	25	100	Oktober : November: Desember:			

NO	SASARAN	STRATEGIS	NO	INDIKATOR	KINERJA	CASCADING		TARGET				REALISASI		CATATAN MONITORING	BSC		
						KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN		LAMPIRAN	BOBOT	SCORE(%)
			1	8	8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika			25 persentase; Triwulan IV	TW1	5	persentase	5	100	Januari : Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika Februari: Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika Maret:		0	0
					Sasaran Kinerja Pegawai :				TW2	7	persentase	7	100	April : Mei: Juni:			
									TW3	7	persentase	7	100	Juli : Agustus: September:			
									TW4	6	persentase	6	100	Oktober : November: Desember:			
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi		2	1	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian			65 persentase; Triwulan IV	TW1	15	persentase	15	100	Januari : Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian Februari: Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian Maret:		0	0
					Sasaran Kinerja Pegawai :				TW2	15	persentase	15	100	April : Mei: Juni:			
									TW3	15	persentase	15	100	Juli : Agustus: September:			
									TW4	20	persentase	20	100	Oktober : November: Desember:			
			2	2	2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi			98 persentase; Triwulan IV	TW1	20	persentase	20	100	Januari : persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi, sudah sesuai standar Februari: persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi, sudah sesuai standar Maret:		0	0
					Sasaran Kinerja Pegawai :				TW2	23	persentase	23	100	April : Mei: Juni:			
									TW3	25	persentase	25	100	Juli : Agustus: September:			
									TW4	30	persentase	30	100	Oktober : November: Desember:			
			2	3	3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi			80 persentase; Triwulan IV	TW1	15	persentase	15	100	Januari : persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi sudah sesuai standar Februari: persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi sudah sesuai standar Maret:		0	0
					Sasaran Kinerja Pegawai :				TW2	15	persentase	15	100	April : Mei: Juni:			
									TW3	24	persentase	24	100	Juli : Agustus: September:			
									TW4	26	persentase	26	100	Oktober : November: Desember:			

NO	SASARAN	STRATEGIS	NO	INDIKATOR	KINERJA	CASCADING		TARGET					REALISASI		CATATAN MONITORING	BSC	
						KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRAN		BOBOT	SCORE(%)
			2	4	4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan			80 persentase; Triwulan IV	TW1	14	persentase	14	100	Januari : persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan sudah sesuai standar Februari: persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan sudah sesuai standar Maret:		0	0
					Sasaran Kinerja Pegawai :				TW2	16	persentase	16	100	April : Mei: Juni:			
									TW3	23	persentase	23	100	Juli : Agustus: September:			
									TW4	27	persentase	27	100	Oktober : November: Desember:			
			2	5	5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin			15 persentase; Triwulan IV	TW1	2	persentase	2	100	Januari : persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan sudah sesuai standar sudah sesuai standar Februari: persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan sudah sesuai standar sudah sesuai standar Maret:		0	0
					Sasaran Kinerja Pegawai :				TW2	2	persentase	2	100	April : Mei: Juni:			
									TW3	5	persentase	5	100	Juli : Agustus: September:			
									TW4	6	persentase	6	100	Oktober : November: Desember:			
			2	6	6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersefikasi			28 persentase; Triwulan IV	TW1	5	persentase	5	100	Januari : Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi Februari: Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi Maret:		0	0
					Sasaran Kinerja Pegawai :				TW2	7	persentase	7	100	April : Mei: Juni:			
									TW3	7	persentase	7	100	Juli : Agustus: September:			
									TW4	9	persentase	9	100	Oktober : November: Desember:			
			2	7	7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif			67 persentase; Triwulan IV	TW1	15	persentase	15	100	Januari : Persentase narapidana yang bekerja dan produktif Februari: Persentase narapidana yang bekerja dan produktif Maret:		0	0
					Sasaran Kinerja Pegawai :				TW2	15	persentase	15	100	April : Mei: Juni:			
									TW3	15	persentase	15	100	Juli : Agustus: September:			
									TW4	22	persentase	22	100	Oktober : November: Desember:			
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban		3	1	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar			80 persentase; Triwulan IV	TW1	17	persentase	17	100	Januari : Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar Februari: Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar Maret:		0	0
					Sasaran Kinerja Pegawai :				TW2	18	persentase	18	100	April : Mei: Juni:			
									TW3	22	persentase	22	100	Juli : Agustus: September:			
									TW4	23	persentase	23	100	Oktober : November: Desember:			

NO	SASARAN	STRATEGIS	NO	INDIKATOR	KINERJA	CASCADING		TARGET					REALISASI		CATATAN MONITORING	BSC	
						KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRAN		BOBOT	SCORE(%)
			3	2	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah			70 persentase; Triwulan IV	TW1	15	persentase	15	100	Januari : Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah Februari: Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah Maret:		0	0
					Sasaran Kinerja Pegawai :				TW2	15	persentase	15	100	April : Mei: Juni:			
									TW3	19	persentase	19	100	Juli : Agustus: September:			
									TW4	21	persentase	21	100	Oktober : November: Desember:			
			3	3	3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib			80 persentase; Triwulan IV	TW1	16	persentase	16	100	Januari : Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib, sudah sesuai standar Februari: Maret:		0	0
					Sasaran Kinerja Pegawai :				TW2	18	persentase	18	100	April : Mei: Juni:			
									TW3	20	persentase	20	100	Juli : Agustus: September:			
									TW4	26	persentase	26	100	Oktober : November: Desember:			
			3	4	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas			70 persentase; Triwulan IV	TW1	15	persentase	15	100	Januari : Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas, sudah sesuai standar Februari: Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas, sudah sesuai standar Maret:		0	0
					Sasaran Kinerja Pegawai :				TW2	15	persentase	15	100	April : Mei: Juni:			
									TW3	17		17	100	Juli : Agustus: September:			
									TW4	28		28	100	Oktober : November: Desember:			
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker		4	1	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu			1 layanan; Triwulan IV	TW1	1	layanan	1	100	Januari : Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu Februari: Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu Maret:		0	0
					Sasaran Kinerja Pegawai :				TW2	1	Layanan	1	100	April : Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu Mei: Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu Juni:			
									TW3	1	Layanan	1	100	Juli : Agustus: September:			
									TW4	1	Layanan	1	100	Oktober : November: Desember: Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu			

NO	SASARAN	STRATEGIS	NO	INDIKATOR	KINERJA	CASCADING		TARGET					REALISASI		CATATAN MONITORING	BSC	
						KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRAN		BOBOT	SCORE(%)
			4	2	2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan			1 layanan; Triwulan IV	TW1	1	layanan	1	100	Januari : Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan Februari: Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan Maret:		0	0
					Sasaran Kinerja Pegawai :				TW2	1	layanan	1	100	April : sudah Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan Mei: sudah Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan, sesuai standart Juni:			
									TW3	1	Layanan	1	100	Juli : Agustus: September:			
									TW4	1	Layanan	1	100	Oktober : November: Desember: sudah Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan			
			4	3	3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan			1 layanan; Triwulan IV	TW1	1	layanan	1	100	Januari : Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan Februari: Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan Maret:		0	0
					Sasaran Kinerja Pegawai :				TW2	1	layanan	1	100	April : Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan sesuai standart Mei: Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan sesuai standart Juni:			
									TW3	1	Layanan	1	100	Juli : Agustus: September:			
									TW4	1	Layanan	1	100	Oktober : November: Desember: Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan sesuai standart			
			4	4	4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu			1 layanan; Triwulan IV	TW1	1	layanan	1	100	Januari : Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu Februari: Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu Maret:		0	0
					Sasaran Kinerja Pegawai :				TW2	1	layanan	1	100	April : sudah Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu Mei: sudah Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu Juni:			
									TW3	1	Layanan	1	100	Juli : Agustus: September:			
									TW4	1	Layanan	1	100	Oktober : November: Desember: sudah Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu			
			4	5	5. Jumlah Layanan Perkantoran			1 layanan; Triwulan IV	TW1	1	layanan	1	100	Januari : Februari: Maret:		0	0
					Sasaran Kinerja Pegawai :				TW2	1	layanan	1	100	April : Mei: Juni:			
									TW3	1	Layanan	1	100	Juli : Agustus: September:			
									TW4	1	Layanan	1	100	Oktober : November: Desember:			